

## **DAFTAR BACAAN**

### **Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034)

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan telah dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280)

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria dan telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 126)

## **Buku**

- Abdurrahman, 1985 “*Tebaran Pikiran mengenai Hukum Agraria*” Bandung : Alumni.
- Ade Rio Prasetyo, 2019, *Perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah yang tanahnya dinyatakan terlantar dan telah dikuasai negara*, Jember : UNEJ
- Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun
- Arie Sukanti, 2003, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*, CV. Rajawali Jakarta.
- Boedi Harsono, 2017, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Bernhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*, Jakarta : Margaretha Pustaka, hlm. 165-168.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum.*, c. 3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hadimulyo, 1997 “*Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*” ELSAM : Jakarta.
- I Nyoman Budi Daya, 2002, *Tinjauan Yuridis Tentang Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Pelaksanaan Landreform*, Yogyakarta.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Mohammad Hatta, 2005, *Hukum Tanah Nasional*. Media Abadi, Yogyakarta.
- Nandang Alamsyah, 2017, *Teori dan Praktek Kewenangan*, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rusmadi Murad, 1999 “*Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*” Bandung : Alumni.
- Reko Dwi Salfutra, 2019, *Hukum Agraria Indonesia*, Yogyakarta, Thafa Media
- Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang.

- Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta.
- Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Suhariningsih, 2009, *Tanah Terlantar*, Prestasi Pustakaraya, Malang
- Syaiful Azam, 2003, “*Eksistensi Hukum Tanah dalam mewujudkan tertib Hukum Agraria*”*Makalah*, Fakultas Hukum USU – Digitized by USU Digital Library
- Urip Satoso, 2017, *Hukum Agraria*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Zaidar, 2014, *Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia*, Pustaka BangsaPress, Medan.

### **Skripsi Dan Tesis**

- Celendula, 2020, “Kewenangan Pemerintah Dalam Redistribusi Tanah Untuk Rakyat”, Skripsi Sarjana Hukum, Jember : Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jember.
- Maksum Rangkuti, 2023, *Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*, Tesis Fakultas Hukum, Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Wiwin Hartini, 2005, “Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Kabupaten Brebes”, Skripsi Sarjana Hukum Dan Kewarganegaraan, Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Yoga Tri Sutomo, 2011, “Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten”, Skripsi Sarjana Hukum, Semarang : Universitas Negeri Semarang.

### **Jurnal**

- Ahmad Fauzi, 2022, “*Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah*,”  
Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6, Nomor 2.
- Amaliyah, A., Ma'ruf, M. A., Sary, N., & Bitu, S. G. 2021. *Reforma Agrariadan Penanganan Sengketa Tanah*. HERMENEUTIKA: Jurnal IlmuHukum, Volume 5, Nomor 1.

- Amiratuk Fatihah, 2023, "*Kajian Hukum Penertiban Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Tanah Terlantar*" Jurnal Notarius, Volume 2, Nomor 1.
- Blessinta Joice Sinaga, Sinaga, Sani Chablitta Siregar, Yanti Agustina, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Haspusnya Hak Milik Atas Tanah Akibat Penelantaran Ditinjau Dari Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria*, Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN, Mei, Vol. 7, Nomor 5.
- Desi Apriani, Arifin Bur, 2021, "*Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia* ", Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 5, Nomor 2.
- Elfachri Budiman, 2005, "*Peradilan Agraria (Solusi Alternatif penuntasan Sengketa Agraria)*" Jurnal Hukum USU Volume 01. Nomor.1.
- Embun Sari et al, 2022 "*Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja*," Jurnal Ius Constituendum Volume 7, Nomor 1.
- Emmy Solina dkk, 2019, "*Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjung Pinang dalam Mengeluarkan Sertifikat hak Kepemilikan Permukiman yang di Atas Air*", Jurnal Selat, Volume 7, Nomor 1.
- Gania Gabriella, 2023, "*Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Penanggulangan Tanah Terlantar*" Tadulako Master Law Journal, Volume 7, Issue 1.
- Ida Nurlinda, 2016, "*Telaah atas Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Pertanahan*", Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1, Nomor1.
- Indri Hadisiswati, 2014 "*Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah*" Jurnal Hukum Islam, Volume 2, Nomor 1.
- Muhammad Reza Winata and Erlina Maria Christin Sinaga, 2019, "*Transparansi Hak Guna Usaha Mendukung Redistribusi Lahan Berdasarkan Hak Konstitusional Mendapatkan Informasi*," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 8, Nomor 3.  
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.341>.
- Pratama, M. Y. (2022). "Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar Di Provinsi Sumatera Selatan". Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK), Volume 5, Nomor 1.
- Urip Santoso, 2016, *Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perspektif. September, Volume XXI Nomor. 3.

Diyan Isnaeni, 2017, "*Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Soisal Ekonomi Masyarakat*" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Oktober, Jilid 46, Nomor 4.

### **Media Masa**

Iman Dani Ramdani S.AP, "Mengawal Pembagian Tanah Negara", OMBUDSMAN RI, 03 Mei 2023.

Mochammad Ade Pamungkas, "Mengenal Program Redistribusi Tanah Kementerian ATR dan Tahapannya.

Novian, "Pengacara PT Veteran Sri Dewi Meminta Pemkab Blitar dan BPN Melakukan Pemisahan Tanah Perkebunan" Mitratoday.com, 02 Maret 2020